



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang diuraikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV mengenai pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengaturan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya negara secara adil serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengelola masyarakat sesuai dengan preferensi mereka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan penerapan otonomi daerah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan pemerintah yang lebih akuntabel dan responsif terhadap tuntutan lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 (2004) dan peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menggantikan dan memperbaiki peraturan ini. Akuntabilitas pemerintah di ubah oleh kedua peraturan ini dari vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi horizontal (kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan rakyat). Hal ini mendorong pembangunan tata kelola yang lebih adaptif dan terbuka. Artinya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya sebagai pengelola pemerintahan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Instansi Pemerintah merupakan organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang dipilih berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Setiap instansi pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan prosedur, bersifat akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Heluka *et al.*, 2022).

Pengukuran kinerja pemerintah memiliki peranan yang sangat penting karena melalui penilaian kinerja yang jelas dan terukur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih aktif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pencapaian karyawan dalam meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan disebut sebagai kinerja, dan evaluasi objektif atas kinerja tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan guna menghasilkan hasil yang lebih baik. Laporan keuangan dan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) kepada pemerintah daerah, serta penyediaan layanan publik dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah. Pencapaian target kinerja kegiatan dalam suatu program, penentuan dan kesuaian hasil, tingkat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pencapaian program, pengaruh hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, dan perilaku karyawan semuanya merupakan cara tambahan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (Heluka *et al.*, 2022).

Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai “Negeri Seribu Parit” merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Riau dengan luas wilayah mencapai lebih dari 11.000 km². Wilayah ini memiliki potensi ekonomi besar terutama dari sektor perkebunan kelapa, perikanan, dan perdagangan. Namun di balik potensi tersebut, Pemerintah Daerah menghadapi tantangan besar dalam memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kinerja birokrasi di seluruh wilayah kecamatan yang tersebar luas dan didominasi oleh perairan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan komitmen untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan inovasi digital berbasis e-SAKIP Smart. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan transparansi pengukuran kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui kegiatan workshop dan pelatihan, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhil dibekali kemampuan dalam mengelola, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja secara lebih terukur <https://mediacenter.inhilkab.go.id/>.

Upaya peningkatan sistem kinerja tersebut membawa hasil positif. Pada tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hilir berhasil meraih penghargaan nasional dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas “Kinerja Pelayanan dan Investasi Daerah” dengan kategori Sangat Baik. Capaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan publik serta komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski demikian, hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Beberapa OPD masih menghadapi kendala dalam efektivitas pelaksanaan program, serapan anggaran, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menandakan bahwa sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar kinerja instansi menjadi lebih efektif dan efisien.

Beberapa hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang dapat diakses, target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Pendidikan Tahun 2024. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan indikator kinerja nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil target 65 realisasi 63,45 capaian 97%. Sasaran strategis kedua meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan target 92 realisasi 84,99 capaian 92%. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan yaitu dengan jumlah masyarakat yang terkadang melebihi jumlah kursi yang disiapkan menyebabkan masyarakat harus berdiri dalam menunggu antrian dan petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi <https://disdukcapilnhil.com/sakip/>.

Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah sasaran strategis meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis unggulan daerah, dengan indikator kinerja persentase UMKM dan koperasi yang naik skala usaha target 63 realisasi 57,9 capaian 91,9%. Sasaran strategis kedua meningkatkan pertumbuhan usaha koperasi dan UMKM, dengan indikator kinerja persentase koperasi yang aktif target 70 realisasi 69,2 capaian 98,9% dan indikator kinerja pertumbuhan usaha kecil menengah baru target 77 realisasi 8,96 capaian 11,6%. Sasaran strategis ketiga meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Inhil dengan indikator kinerja nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dengan target 73 realisasi 70.95 capaian 97,1%. Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, Masih rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi pengelola Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dan Sulitnya mengubah pola pikir wirausaha pemula dan pengelola koperasi agar lebih bertanggungjawab terhadap kelangsungan lembaga maupun usahanya tanpa bantuan dari Pemerintah. <http://diskopumkm.inhilkab.go.id/laporan-kinerja-insta-nsi-pemerintah-lkjip/>.

Pada Dinas Pendidikan sasaran strategis meningkatkan akses pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkeadilan dengan indikator kinerja angka partisipasi sekolah (1-12) target 101.04 realisasi 95,45 capaian 94,47% dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

Angka partisipasi sekolah (13-15) target 92,55 realisasi 75,82 capaian 81,92%
Angka melanjutkan mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan oleh beberapa keluarga mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak ke tingkat lebih tinggi, terutama jika mereka harus membeli seragam, buku, atau biaya transportasi dan di daerah tertentu, anak-anak mungkin terpaksa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan Program bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), mungkin tidak menjangkau seluruh anak yang membutuhkan di daerah <https://disdik.inhilkab.go.id/laporan-kinerja/>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Pendidikan, terdapat beberapa fenomena yang mencerminkan tantangan dalam kinerja instansi pemerintah. Meskipun ada pencapaian yang mencolok, seperti nilai AKIP yang mendekati target, sebagian besar indikator menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi, seperti dalam hal peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perkembangan UMKM, di mana banyak dari mereka gagal mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menggaris bawahi perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi dan implementasi reformasi birokrasi serta kualitas pelayanan, agar dapat memberdayakan masyarakat secara lebih efektif, terutama dalam peningkatan akses pendidikan yang berkeadilan dan merata.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan kinerja instansi pemerintah adalah penegendalian internal yang diterapkan dalam organisasi. Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses, yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang bertujuan untuk membantu suatu organisasi mencapai suatu tujuan. Sumber daya organisasi dapat dikelola, dilacak dan dievaluasi melalui pengendalian internal. Pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah dan mengidentifikasi situasi kecurangan dan menjaga sumber daya perusahaan, baik materi maupun non-materi. Pengendalian internal juga membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi operasi organisasi, menyampaikan laporan keuangan, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengawasan internal menetapkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tata kelola daerah. Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat efektifitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Dengan demikian, pengawasan diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan tersebut (Karlina *et al.*, 2023). Dari laporan BPK yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.426 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.573 (29%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.953 (54%)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 900 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern pada semester I tahun 2024.

Sedangkan pada semester II tahun 2024 hasil pemeriksaan mengungkapkan 622 (27%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Maluku Tengah, antara lain yaitu Pungutan retribusi pelayanan kesehatan pada 5 puskesmas melebihi tarif perda, Identitas nama dan alamat penerima hibah uang/barang belum diperinci dalam Lampiran dan Penjabaran APBD Perubahan, serta terdapat penyaluran hibah uang kepada penerima yang tidak memenuhi persyaratan. Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 343 pemerintah daerah lainnya <https://www.bpk.go.id/ihps>. Dari Permasalahan kelemahan SPI menunjukkan tantangan dalam pengelolaan pemerintah daerah yang perlu diatasi untuk mencapai *good governance*. Pentingnya kolaborasi antar instansi terkait juga tidak bisa diabaikan dalam upaya memperkuat sistem pengendalian internal. Upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Lingkungan Pengendalian adalah komponen pertama dari beberapa komponen yang membentuk Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP). Para pemimpin lembaga pemerintah harus membangun dan mempertahankan lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku baik dan memfasilitasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penggunaan SPIP di tempat kerja. Integritas nilai-nilai etika, dedikasi terhadap kompetensi, kebijakan yang menguntungkan, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab yang tepat, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang baik mengenai pelatihan sumber daya manusia, keberhasilan pelepasan peran aparat pengawasan internal pemerintah, dan hubungan kerja yang positif dengan lembaga pemerintah terkait, semuanya diperlukan untuk mencapai aktivitas ini (Karlina *et al.*, 2023).

Untuk mencapai tujuan seperti perlindungan aset, pemeliharaan catatan yang lengkap, penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipercaya, pembuatan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, peningkatan efisiensi operasional, jaminan keberadaan kebijakan manajerial yang telah ditentukan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, sistem pengendalian internal pemerintah akan berdampak pada kinerja lembaga pemerintah. Tingkat komitmen akan menentukan apakah kinerja berhasil atau tidak. Membangun komitmen antara karyawan dan perusahaan, serta antara karyawan dan organisasi, sangat penting untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang profesional. Setiap orang di perusahaan, dari tingkat terendah hingga tertinggi, tunduk pada pengendalian internal (Putra *et al.*, 2022).

Menerapkan tata kelola yang baik dalam sistem pemerintahan adalah salah satu cara untuk mendukung pengembangan layanan publik berkualitas tinggi. Istilah tata kelola yang baik berasal dari bahasa induk Eropa *governance* yang diadopsi oleh bahasa Inggris sebagai *govern* yang berarti mengalahkan (mengendalikan). Diskusi tentang tata kelola pemerintah yang ideal dikenal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

sebagai *good governance*. Pentingnya kolaborasi antara sektor publik, swasta dan pemerintah dalam menghasilkan layanan publik berkualitas tinggi tidak dapat diabaikan karena hal itu mendorong kreativitas dan pelaksanaan program yang efektif. Gagasan tata kelola yang baik berkembang seiring dengan pergeseran sistem politik menuju demokrasi dan transisi dari ekonomi direktif ke ekonomi pasar. Tata kelola yang baik kini melibatkan masyarakat sipil, khususnya sektor bisnis, yang berperan dalam tata kelola bukan pemerintah (negara). Layanan publik yang efektif, sistem kontrol yang dapat dipercaya, dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat adalah contoh dari tata kelola yang baik (Wulansari, 2024).

Setiap warga negara dalam suatu pemerintah mengharapkan pemerintah tersebut dijalankan dengan baik. Diharapkan bahwa penerapan tata kelola pemerintah yang baik akan meningkatkan standar pemerintah dan menegakkan ketertiban dinegara tersebut. Berbagai komunitas memiliki gagasan yang berbeda tentang tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu tanda bahwa *Good Governance* yang baik digunakan dengan tepat dan berhasil adalah masyarakat yang makmur (Lionandiva & Triandi, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, draf tata kelola pemerintah yang baik telah disusun. Tata kelola pemerintah yang baik dikenal sebagai pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan organisasi. Dalam situasi ini, mendorong sinergi positif membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Globalisasi dan evolusi zaman merupakan kekuatan pendorong dibalik *good governance*. Akibatnya, pemerintah didesak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

untuk beroperasi secara terbuka dan sistematis. Transparansi ini dapat meningkatkan komponen demokrasi dalam administrasi pemerintah dengan meningkatkan pengawasan publik terhadapnya (Aisy & Haryanto, 2024).

Good Governance secara umum didefinisikan sebagai administrasi pemerintahan yang sehat berdasarkan etika profesional. Menurut Bank Dunia *good governance* adalah upaya untuk membangun manajemen pembangunan yang sehat dan akuntabel (Dharu, 2021). Bagi semua sektor, terutama sektor publik *Good Governance* yang berarti pemerintahan yang baik merupakan sebuah tantangan. Kinerja pemerintah yang kurang memuaskan, khususnya inspektorat di pemerintah daerah, adalah salah satu alasan utama mengapa *Good Governance* perlu diterapkan (Hidayat *et al.*, 2021).

Upaya pemerintah untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan dan melibatkan publik guna menciptakan transparansi kinerja disebut sebagai *Good governance*. Sementara akuntabilitas lembaga mencakup pengungkapan dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, termasuk aktivitas, laporan keuangan dan pilihan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Transparansi ini menghasilkan indeks penilaian untuk akuntabilitas suatu lembaga. Penerapan prinsip *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya publik. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik (Karlina *et al.*, 2023). Dari laporan (BPK) yang telah



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

diakses pada laporan yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah, hasil pemeriksaan mengungkapkan 7.845 (59%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan administrasi sebesar 1.962 (25%) dan 5.883 (75%) permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dengan angka 4.147 (70%) sebesar Rp 2,45 triliun, potensi kerugian dengan angka 693 (12%) sebesar Rp 405,20 miliar dan kekurangan penerimaan dengan angka 1.043 (18%) sebesar 631,20 miliar. Sehingga jumlah keseluruhannya yaitu dengan angka 5.883 sebesar Rp 3,49 triliun pada semester I tahun 2024. Sedangkan pada semester ke II tahun 2024 terdapat 1.595 (70%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 259 (16%) penyimpangan administrasi dan 1.336 (84%) permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian dengan angka 954 (72%) sebesar Rp 463,80 miliar, potensi kerugian dengan angka 178 (13%) sebesar Rp 135,06 miliar dan kekurangan penerimaan dengan angka 204 (15%) sebesar Rp 151,54 miliar. Sehingga jumlah keseluruhannya yaitu dengan angka 1.336 sebesar Rp 750,40 miliar <https://www.bpk.go.id/ihps>.

Salah satu masalah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rekonstruksi Jalan Ruas VI Pulau Kijang-Sanglar. Dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rekonstruksi Jalan Ruas VI Pulau Kijang-Sanglar, Ada dua tersangka yakni E yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Inhil dan EAS selaku Direktur PT Gunung Guntur, berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, akibat dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek tersebut negara mengalami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

kerugian sebesar Rp 6.270.011.525,33. Adapun bentuk kealfaan berupa Pelanggaran Spesifikasi dan Kekurangan Volume. Sehingga penyidik bersama tim ahli teknik sipil menemukan adanya kekurangan volume dan mutu beton struktur FC20 Mpa (K-250). Maka dari hasil pengukuran ditemukan selisih yang cukup signifikan. Seperti panjang rencana: 5.294 meter. Realisasi: 1.387 meter. Kekurangan: 3.906 meter. Volume Beton Rencana: 5.294 m³. Realisasi: 907,94 m³. Kekurangan: 4.296 m³. Mutu Beton Rencana: 20 MPa. Realisasi: 17,5 MPa. Kekurangan: 2,5 Mpa <https://pekanbarupos.co>. Masalah dugaan tindak pidana korupsi ini memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Peristiwa tersebut juga menunjukkan pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Selain itu, kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dana publik agar tidak ada lagi penyimpangan serupa di masa mendatang.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah. (Putra *et al.*, 2022) *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda* hasil yang di dapatkan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Karlina *et al.*, (2023) *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah* hasil yang di dapat akuntansi sektor publik dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Sedangkan, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.

Handayani *et al.*, (2024) *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten OKU* hasil yang di dapat bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ada pengaruh yang signifikan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai Pengaruh Pengaruh Pengaruh Pengendalian Internal, Dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini merupakan *review* dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian Karlina *et al.*, (2023). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian, variabel penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel penelitian penerapan akuntansi sektor publik, dan pengawasan internal, objek penelitiannya pada



Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2026.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Pengendalian Internal dan *Good Governance* berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah prosedur yang dipengaruhi oleh tindakan dewan komisaris, manajemen, atau anggota staf lainnya dan dimaksudkan untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan keakuratan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Selain itu, prosedur ini bertindak sebagai pengaman terhadap bahaya yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi (Karlina *et al.*, 2023).

b. *Good Governance*

Good Governance didefinisikan sebagai manajemen yang sehat dalam suatu bisnis berdasarkan etika profesional dalam bisnis dan pekerjaan. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk sektor publik tetapi juga berfungsi sebagai referensi penting bagi perusahaan swasta untuk menjaga integritas dan meningkatkan transparansi. Tata kelola yang baik mewujudkan penerimaan pentingnya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

seperangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis dan pelayanan publik (Hidayat *et al.*, 2021).

c. Kinerja Instansi pemerintah

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran derajat pencapaian atau tujuan instansi pemerintah sebagai gambaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan derajat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis dapat digunakan untuk mengukur efektivitas lembaga pemerintah (Putra *et al.*, 2022).

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui lebih tentang Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Temuan yang diperoleh juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan karya tulis lanjutan guna meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian di masa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja instansi pemerintah serta pentingnya Pengendalian Internal dan *Good Governance* dalam pemerintahan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran terutama mengenai Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.